



PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar Kode Pos 57714

Telp. (0271) 495059 Fax. 495102 Website: dinkes.karanganyarkab.go.id

E-mail: dinkes@karanganyarkab.go.id

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT akhirnya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini memberikan gambaran pencapaian kinerja pemerintah yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) berfungsi sebagai alat kendali, alat pendorong dan alat penilai terwujudnya *Good Governance* yaitu pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, transparan dan akuntable. Semangat kebersamaan melandasi dalam penyusunan laporan ini yang merupakan salah satu upaya menuju pemerintahan yang *Good Governance*.

Besar harapan kami, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga pelayan kesehatan yang paling mendasar dan esensial dapat dipenuhi pada tingkat yang paling minimal di wilayah Kabupaten Karanganyar, sesuai indikator kinerja dalam pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan lima tahunan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar khususnya dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR



PURWATI, SKM., M.Kes

Pembina

NIP. 19730723 199303 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Isu Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis OPD Tahun 2020	5
II.2. Rencana Kinerja Tahunan OPD Tahun 2020	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pencapaian Kinerja	17
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	49
2. Saran	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Tahun 2021	
Cascading IKU OPD Tahun 2021	
Rencana Aksi OPD Tahun 2021	
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2021	
Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, maka sumber daya bidang kesehatan dituntut bekerja secara profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Selaras dengan semangat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terbentang peluang dan tantangan bagi sektor kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan untuk mampu menyusun rencana serta menetapkan strategi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah dan dapat menjamin lebih efektifnya upaya pelayanan kesehatan sehingga diharapkan lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

LKjIP merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LKjIP juga berfungsi sebagai alat kendali, alat pendorong dan alat penilai terwujudnya *good governance* yaitu pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan yang meliputi promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Kesehatan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Struktur Organisasi

Salah satu wujud implementasi dari desentralisasi di bidang kesehatan adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Karanganyar nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Yang selanjutnya dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor

97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Berikut susunan struktur organisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar terdiri bidang dari 4 bidang yang masing-masing terdiri dari tiga seksi, dengan susunan organisasi selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- D. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 3. Seksi Pelayanan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan
- E. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana dan Perizinan
 - 3. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan
- F. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- G. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - a. UPT Laboratorium Kesehatan
 - b. UPT Instalasi Perbekalan Farmasi

- c. Rumah Sakit Umum Daerah
 - d. Puskesmas
- H. Kelompok Jabatan Fungsional

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut

:

1. Pemenuhan dan peningkatan sumber daya kesehatan untuk mendukung penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita, prevalensi gizi buruk dan stunting. Meskipun telah memenuhi target yang diharapkan indikator ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya mengingat AKI-AKN-AKB-AKABA dan gizi buruk merupakan vital statistik yang dipengaruhi banyak faktor.
2. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan dalam pencapaiannya penurunan AKI-AKN-AKB-AKABA dan gizi buruk.
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana di puskesmas sesuai dengan PMK 75 tahun 2014.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dan stake holder dalam mendukung penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita serta prevalensi gizi buruk.
5. Pemantapan manajemen tata kelola BLUD di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagai dokumen teknis operasional. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu bentuk upaya implementasi visi Pembangunan Kabupaten Karanganyar "**Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar**".

Sebagai OPD teknis, Dinas Kesehatan mendukung 2 sasaran strategis, yaitu :

Sasaran 1 : Menurunnya angka kematian disasaran prioritas

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi

II.1. RENCANA STRATEGIS OPD TAHUN 2021

Rencana Strategis OPD ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/170 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023. Dokumen tersebut juga merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja OPD dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Karanganyar juga mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional yang telah ditetapkan dan Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2013. Adapun penyusunan penetapan rencana kinerja dalam Rencana Strategis terutama didasarkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

A. VISI dan MISI

Visi : "Motor penggerak utama terwujudnya Karanganyar sehat yang mandiri".

- Misi :**
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui kerjasama antar pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat
 2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
 3. Mewujudkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel.
 4. Mengembangkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan

II.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Karanganyar, adalah meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) menjadi 77,82 pada akhir periode Renstra.

Sasaran Pembangunan Kesehatan adalah :

1. Menurunnya angka kematian di sasaran prioritas dengan indikator :
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu pada tahun 2020 adalah 65 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu ditargetkan menjadi < 80 per 100.000 kelahiran hidup.
 - b. Angka Kematian Bayi usia 28 hr sampai 11 bulan (AKB)
Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 adalah 8,4 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2021 Angka Kematian Bayi ditargetkan menjadi < 10 per 1000 kelahiran hidup.
 - c. Angka Kematian Neonatus usia 0 sampai 28 hari (AKN)
Angka Kematian Neonatal menjadi indikator dikarenakan angka kematian bayi terbesar ada di usia neonatal. Pada tahun 2020 Angka Kematian Neonatal 5 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2021 Angka Kematian Neonatal ditargetkan menjadi < 7 per 1000 kelahiran hidup.
 - d. Angka Kematian Balita usia 0 sampai 4 tahun 11 bulan (59 bln) (AKBA)
Angka Kematian Balita tahun 2020 adalah 2,46 per 1000 populasi balita, pada tahun 2021 ditargetkan menjadi < 5 per 1000 populasi balita.
(terdapat perubahan definisi operasional sesuai pedoman statistik kesehatan)

2. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi

a. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP pada tahun 2020 adalah 80,14. Dan pada tahun 2021 ditargetkan Nilai SAKIP sebesar 75.

Pernyataan tujuan dan sasaran tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar beserta indikatornya disajikan pada tabel 2.1, yang kemudian dilakukan perubahan pada renstra 2010 – 2023, pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator
(Renstra 2018-2023)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
		UHH (th)	77,32	77,57	77,82	77,37	77,82
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya angka kematian di sasaran prioritas	AKI/100.000 Kelahiran Hidup	< 75	<65	<55	<45	<35
		AKN/ 1.000 Kelahiran Hidup	< 5,5	< 5,5	< 5	< 5	< 4,9
		AKB/1.000 Kelahiran Hidup	< 9	< 8,8	< 8,6	< 8,4	< 8,2
		AKBA/ 1.000 populasi balita	<10	<9,5	<9,4	<9,4	<9
	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai SAKIP	71	73	75	77	80

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator
(Perubahan Renstra 2018-2023)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN		TARGET		
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		UHH (th)	77,38	77,47	77,60	77,63	77,84
	Menurunnya angka kematian di sasaran prioritas	AKI/100.000 Kelahiran Hidup	49,14	65	<80	<80	<75
		AKN/ 1.000 Kelahiran Hidup	5,1	5	< 7	< 7	< 7
		AKB/1.000 Kelahiran Hidup	8,36	8,4	< 10	< 10	< 9,7
		AKBA / 1.000 populasi balita	2,38	2,46	<5	<5	<5
	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai SAKIP	79,89	80,14	75	77	80

II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN OPD TAHUN 2021

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

A. DINAS KESEHATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKP
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugan dan Fungsi
 - 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Parasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan Puskesmas
 - 2) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 3) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - 6) Pengadaan Obat, Vaksin
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir
 - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Diabetes Mellitus
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/atau Berpotensi Bencana

- 15)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 16)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 17)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 18)Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 19)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- 20)Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 21)Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 22)Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 23)Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 24)Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 25)Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 26)Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberiaan Obat Massal)
- 27)Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - 1) Pengelolaan Sistem informasi Kesehatan
- d. Penerbitan Perizinan Rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya
 - 2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 3) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

- 2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

- a. Pemberiaan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 3) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- c. Penebitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penebitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

- d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajan
- e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 1) Pemeriksaan Post Market pada produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
 - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

5. Program Perberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

B. PUSKESMAS

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar

- 2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tasikmadu
- 3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jaten I
- 4) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jaten II
- 5) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kebakkramat I
- 6) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kebakkramat II
- 7) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mojogedang I
- 8) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mojogedang II
- 9) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangpandan
- 10) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Matesih
- 11) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tawangmangu
- 12) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngargoyoso
- 13) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jenawi
- 14) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kerjo
- 15) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Colomadu I
- 16) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Colomadu II
- 17) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gondangrejo
- 18) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jumapolo
- 19) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jatipuro
- 20) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jatiyoso
- 21) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jumantono

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Karanganyar
 - 2) Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Tasikmadu
 - 3) Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jaten I
 - 4) Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jaten II
 - 5) Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kebakkramat I
 - 6) Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kebakkramat II
 - 7) Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Mojogedang I
 - 8) Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Mojogedang II
 - 9) Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Karangpandan
 - 10)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Matesih
 - 11)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Tawangmangu
 - 12)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Ngargoyoso
 - 13)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jenawi
 - 14)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kerjo
 - 15)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Colomadu I
 - 16)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Colomadu II
 - 17)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Gondangrejo
 - 18)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jumapolo
 - 19)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jatipuro
 - 20)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jatiyoso
 - 21)Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jumantono

C. RSUD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Karanganyar

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 - 3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja yang diukur melalui perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target kinerja yang telah disusun dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dan kemudian dilakukan Perubahan RENSTRA Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 yang kemudian disusuli dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat pada awal Tahun dan Perjanjian Kerja setelah dilakukan penetapan DPA Perubahan.

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan Perubahan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Kesehatan dibantu oleh 24 UPT menjalankan 5 Program, 22 Kegiatan dan 122 Sub Kegiatan dengan rincian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan : 5 program, 22 Kegiatan, 74 Sub Kegiatan
2. Rumah Sakit Umum Daerah : 2 Program, 4 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan
3. Puskesmas : 2 Program, 2 Kegiatan, 42 Sub Kegiatan

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert, dengan interval sebagai berikut :

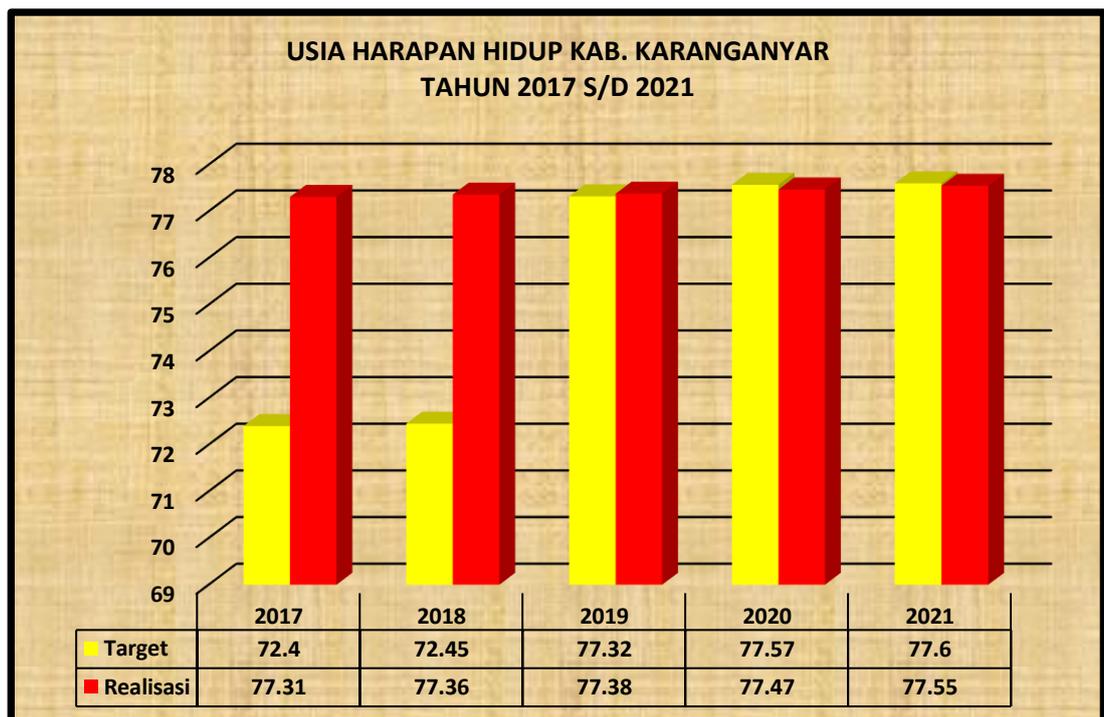
$\geq 91 \%$: sangat tinggi
$76\% \text{ s.d } \leq 90 \%$: tinggi
$66\% \text{ s.d } \leq 75\%$: sedang
$51\% \text{ s.d } \leq 65 \%$: rendah
$\leq 50\%$: sangat rendah

1. Pencapaian Indikator Tujuan

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, adalah : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indicator tujuan Meningkatnya Usia Harapan Hidup.

Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari Gambar 3.1

Gambar 3.1



Dari grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa Usia Harapan Hidup di Kabupaten Karanganyar naik dari tahun ke tahun dan melebihi target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 untuk target Usia Harapan Hidup adalah 77,57, sedangkan realisasinya adalah 77,47. Pada tahun 2021 untuk target Usia Harapan Hidup adalah 77,60, sedangkan realisasinya adalah 77,55. Sehingga Usia Harapan Hidup pada tahun 2020 dan 2021 tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini kemungkinan karena adanya pandemi covid 19. Karena pandemi covid 19 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. PHK karyawan serta

pengurangan jam kerja karyawan yang berimbas pada penurunan daya beli masyarakat, yang kalau dibandingkan pengeluaran perkapita masyarakat pada tahun 2019 sebesar 11.569 menjadi 11.428 pada tahun 2020 (Data BPS). Dari segi kesehatan adanya pandemi covid 19 menyebabkan angka kematian juga meningkat.

Peningkatan Usia Harapan Hidup menjadi salah satu indikator meningkatnya indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang mencapai 75,99 pada Tahun 2021. Yang kalau dibandingkan IPM pada tahun 2020 sebesar 75,86. Sehingga bila dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar.

2. Pencapaian Indikator Sasaran

a) Sasaran Pertama, Menurunnya angka kematian di sasaran prioritas

Tabel 3.1.
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KE SATU

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Presentase Pencapaian sasaran (%)	Tahun 2021		Presentase Pencapaian Sasaran (%)	KET
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	AKI	per 100.000 KH	<65	65	100,00	<80	164,89	(6,11)	Tidak Tercapai
2	AKN	per 1.000 KH	<5,5	5	109,00	<7	6,34	109,43	Tercapai
3	AKB	per 1.000 KH	<8,8	8,4	104,55	<10	8,33	116,70	Tercapai
4	AKBA	per 1.000 Populasi balita	<9,5	0,31	196,74	<5	2,58	148,40	Tercapai

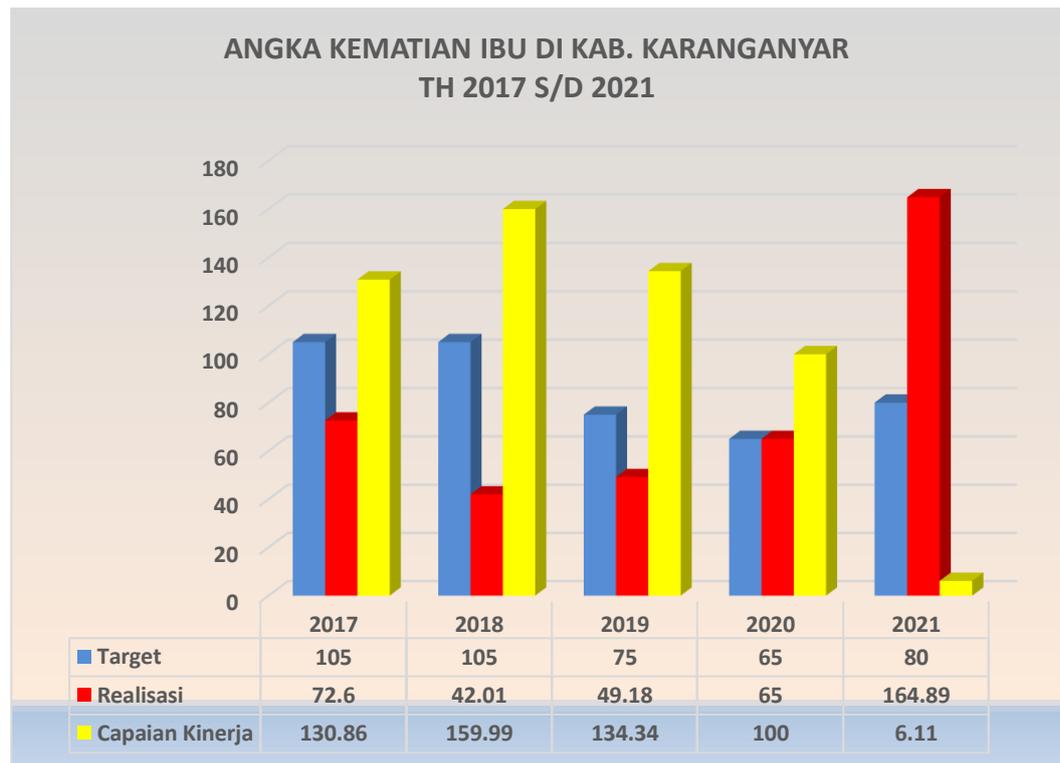
Menurut tabel 3.1 di atas, dari 4 indikator yang ditetapkan, pada tahun 2020 semua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai yaitu indikator Angka Kematian Ibu dimana dari target < 80, realisasinya adalah 164,89 per 1000 kelahiran hidup. Hal tersebut dikarenakan banyak ibu hamil yang terkena covid-19 sehingga menyebabkan peningkatan resiko ibu hamil.

Trend capaian indikator sasaran 1 dari tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Angka kematian Ibu (AKI)

Trend Angka kematian Ibu dapat dilihat dari gambar 3.1.1 berikut :

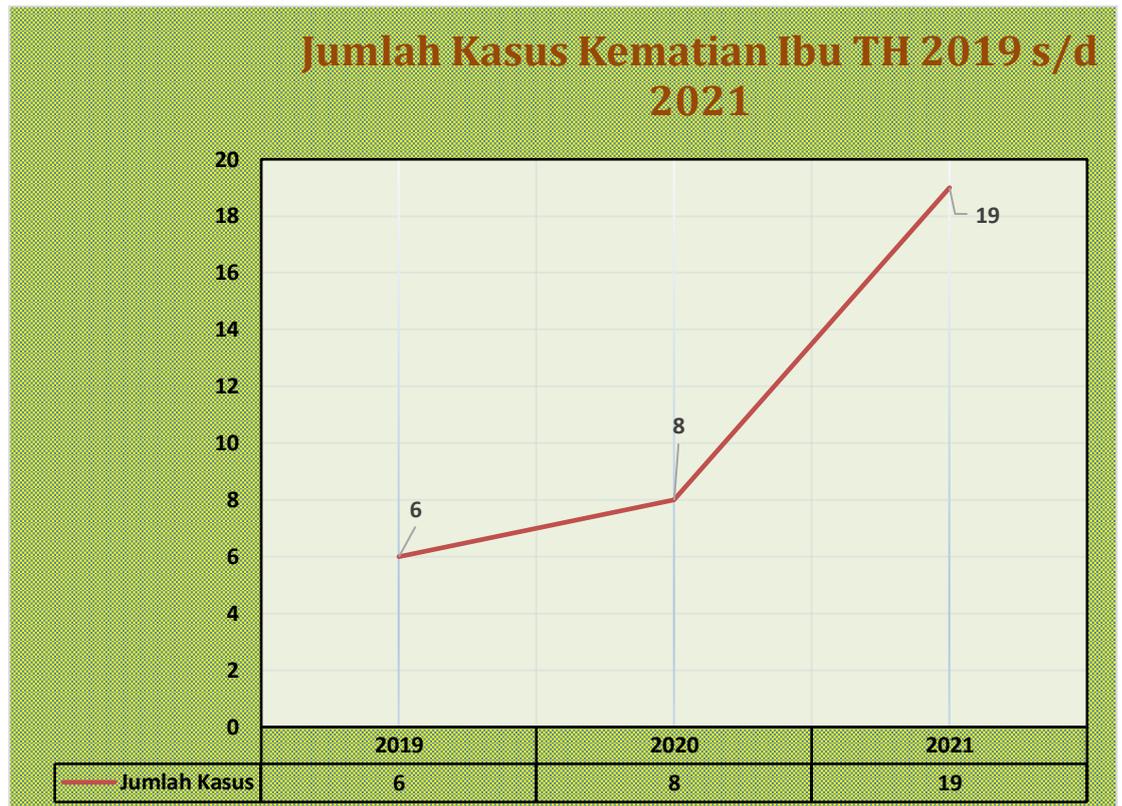
Gambar 3.1.1
Gambaran Angka Kematian Ibu di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2017-2021



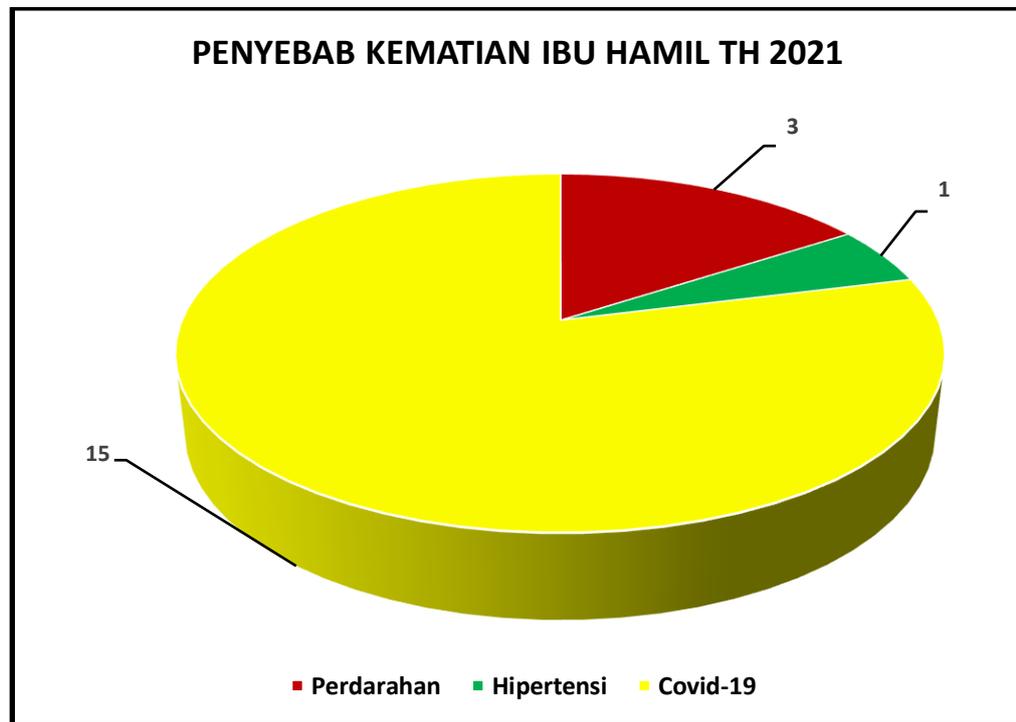
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa angka kematian ibu menunjukkan penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 ada kenaikan sedikit walaupun angka tersebut masih dibawah atau sama dengan target yang dicanangkan. Dimana Angka Kematian Ibu di tahun 2019 49,18/kelahiran hidup menjadi 65/kelahiran hidup pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan angka kematian ibu yang sangat signifikan, hal tersebut dikarenakan banyak dari ibu hamil yang menderita covid-19 sehingga menaikkan resiko tinggi pada ibu hamil. Jika menggunakan angka absolut, jumlah kematian ibu naik dari 6 kasus

pada tahun 2019 menjadi 8 kasus pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 19 kasus kematian ibu yang didominasi karena covid-19. Berikut trend kenaikan jumlah kasus kematian ibu, seperti yang tersaji dalam grafik berikut.

Gambar 3.1.2
Gambaran Kasus Kematian Ibu Hamil
Tahun 2019 - 2021



Gambar 3.1.3
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2021
Kabupaten Karanganyar



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kasus kematian ibu hamil terbanyak disebabkan karena covid-19 yaitu sebanya 15 kasus atau 78,95%.

Analisis Capaian

Hasil evaluasi kasus kematian yang dilakukan oleh Tim Audit Maternal perinatal adalah perlunya pencegahan primer dan pencegahan sekunder dalam penanganan komplikasi maternal, agar kasus yang sama tidak terulang pada tahun yang akan datang.

- 1) Pencegahan primer meliputi peningkatan program Keluarga Berencana, Pelayanan antenatal care sesuai standar dan perlunya ditingkatkan konsep bina wilayah sesuai Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA.
- 2) Pencegahan sekunder meliputi implementasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan Komplikasi.

P4K merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di desa dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.

Upaya rencana tindak lanjut untuk menurunkan kematian ibu yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah dengan:

1. Penanganan kasus covid-19 pada ibu hamil sesuai standar prosedur yang berlaku.
 2. Melakukan pengecekan terhadap ibu hamil yang mendekati masa persalinan dengan prosedur covid-19.
 3. Advokasi, koordinasi lintas sektor terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
 4. Peningkatan kapasitas nakes baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
 5. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
- A. Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Kesehatan Ibu Bersalin, yang meliputi objek kegiatan antara lain :
 - a) Penguatan jejaring rujukan
Dengan difasilitasi Dinas Kesehatan, diharapkan pelayanan kasus rujukan utamanya kasus maternal dapat segera ditangani sesuai standar.

b) Orientasi Maternal Death Notification

Orientasi atas pengisian aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka pelaporan kasus kematian ibu yang harus dilaporkan oleh setiap jenjang fasyankes

c) Koordinasi lintas program dan lintas sektor

Peningkatan kerjasama lintas dan lintas program dalam penurunan AKI dan AKB ataupun menyikapi risiko terjadinya kematian pada sasaran prioritas. Hal ini dikarenakan masalah kematian bukan hanya dipengaruhi oleh ibu, dan tenaga kesehatan. Akan tetapi keluarga, dan faktor sosial budaya sangat berpengaruh.

d) Super Fasifasilitatif

Adalah kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada Puskesmas untuk melatih penyusunan instrumen yang digunakan oleh Puskesmas dalam melakukan supervisi/bintek ke jaringan dan jejaring di wilayah kerjanya, dalam rangka peningkatan mutu layanan.

2) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

3) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Taingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

a) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Taingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan :

1. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Taingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

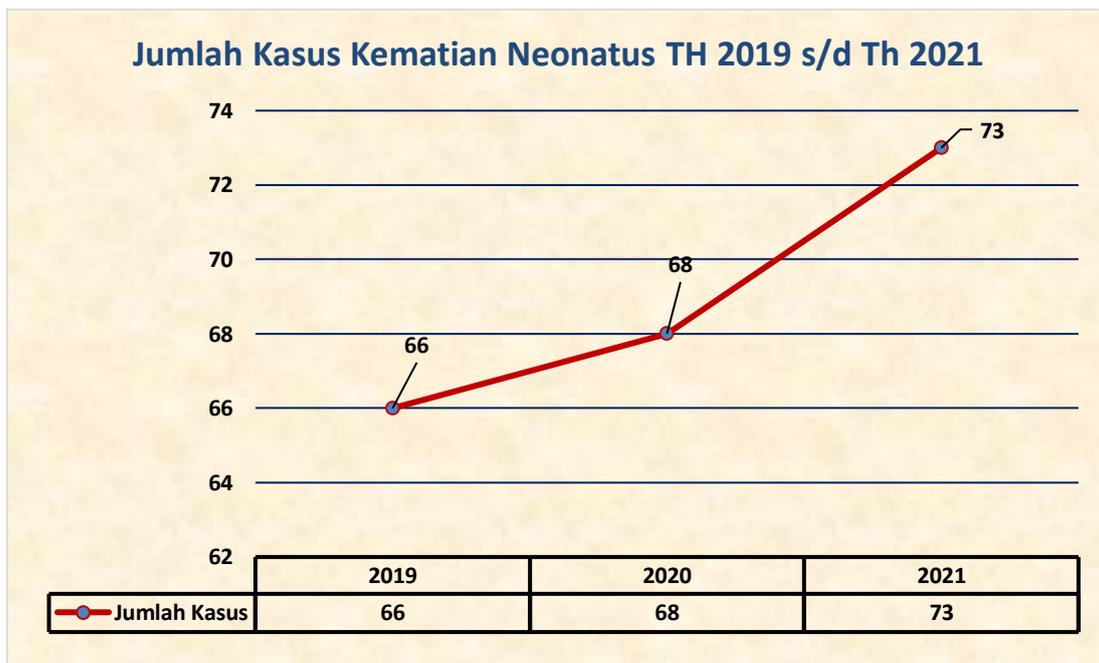
a) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Taingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Angka Kematian Neonatal (AKN)

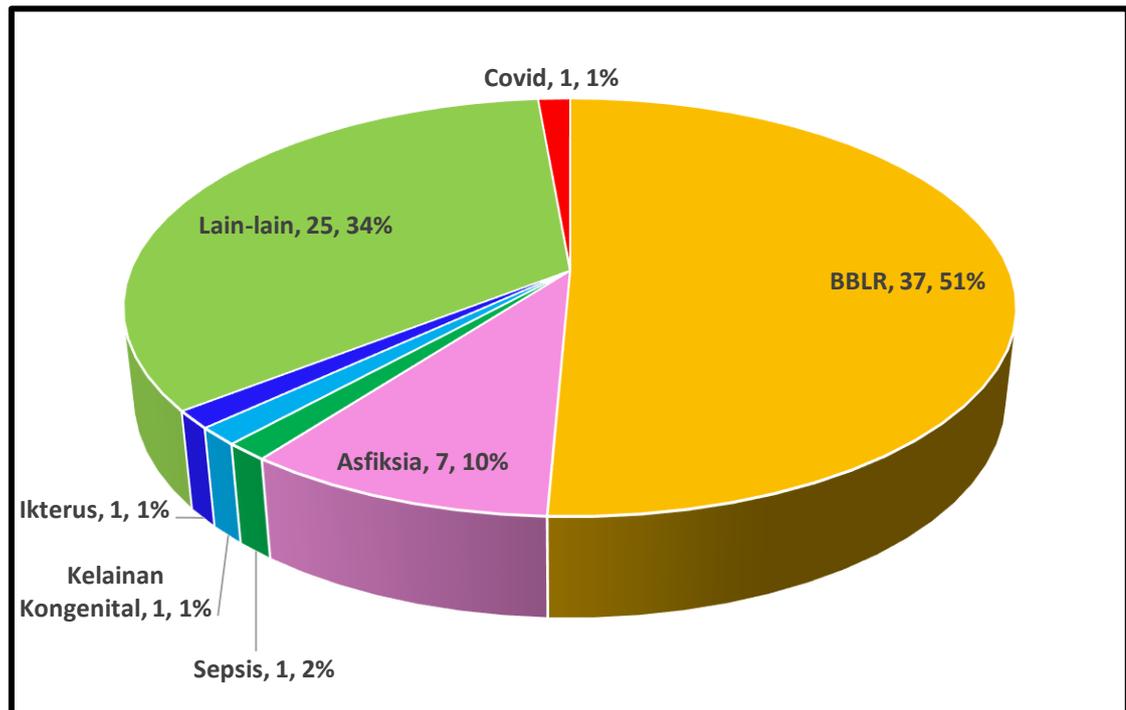
Angka Kematian Neonatal (AKN) dijadikan sebagai indikator karena Kematian pada Bayi > 50% ada didalam kategori usia neonatal, sehingga upaya penurunan kematian bayi bisa lebih spesifik pada usia neonatal. Target Angka Kematian Neonatal pada tahun 2021 sebesar < 7 / 1000 KH.

Tahun 2019 jumlah kasus kematian neonatal 66 kasus (5,4/1000 KH) dan pada Tahun 2020 jumlah kasus kematian neonatal 68 (5/1000 KH), sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus kematian neonatal 73 (7/1000 KH). Seperti yang tersaji dalam grafik berikut.

Gambar 3.2.1
Jumlah Kasus Kematian Neonatus Th 2019 s/d Th 2021
Kabupaten Karanganyar



Gambar 3.2.2
Penyebab Kematian Neonatus Tahun 2021
Kabupaten Karanganyar



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa penyebab kematian neonatal terbanyak adalah kasus BBLR yang sebanyak 37 kasus atau 51% dari penyebab kasus kematian pada neonatal.

Kematian neonatal ini sangat dipengaruhi kesehatan ibu masa hamil, proses persalinan dan pelayanan masa neonatal serta upaya penanganan pada ibu dan bayi yang mengalami komplikasi baik ditingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang belum sesuai standar sampai ditingkat rujukan.

Upaya Rencana Tindak Lanjut untuk menurunkan Kematian Neonatal dengan :

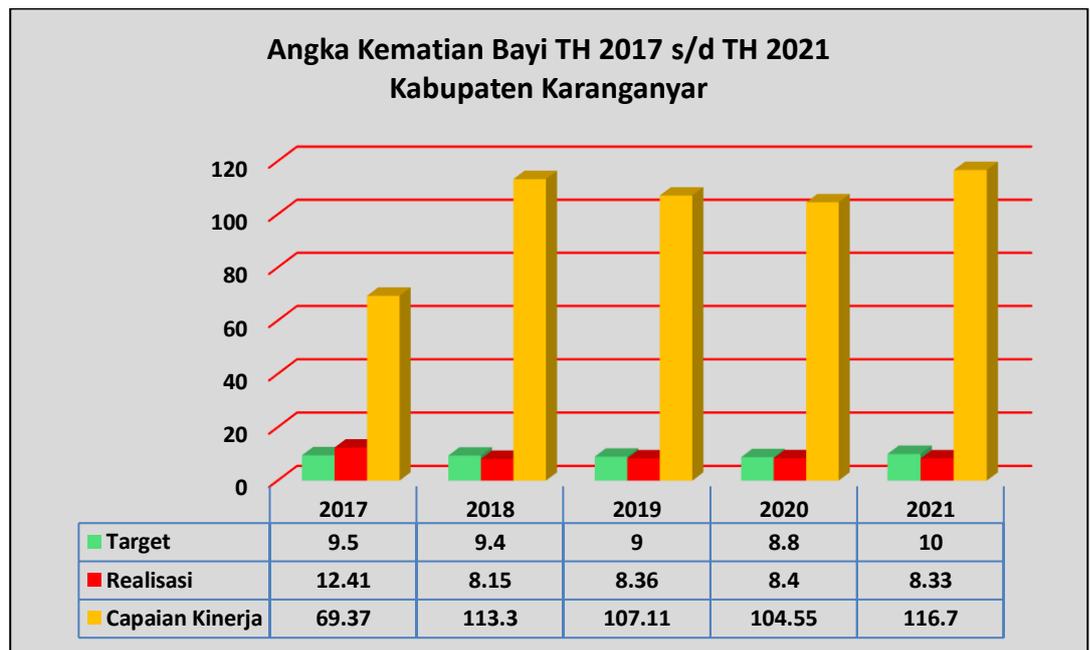
- 1) Peningkatan kualitas pelayanan sejak masa pra hamil, hamil sampai persalinan dan masa neonatal
- 2) Peningkatan sarana prasarana di tingkat pelayanan dasar dan rujukan
- 3) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan komplikasi pada neonatal.

- 4) Perbaiki sistem rujukan baik di RS dalam wilayah maupun RS perbatasan.
- 5) Advokasi dan koordinasi antar lintas program dan sektor dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita.

3. Angka Kematian Bayi (AKB)

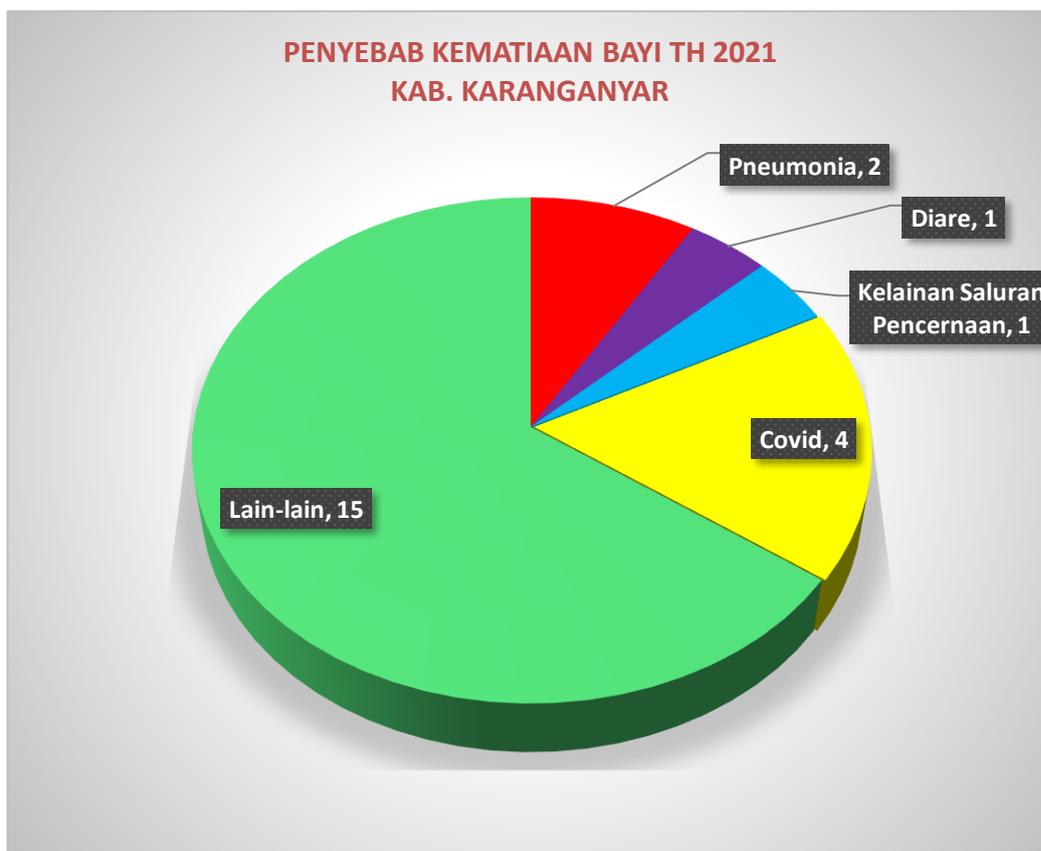
Trend Angka kematian Bayi (AKB) dapat dilihat dari gambar 3.3.1 berikut :

Gambar 3.3.1
Gambaran Angka Kematian Bayi di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2017-2021



Dari gambar di atas dilihat bahwa angka kematian bayi relatif stabil di Kabupaten Karanganyar, tetapi sejak tahun 2018 realisasi selalu tercapai dan selalu dibawah target yang ditetapkan.

Gambar 3.3.2
Gambaran Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021



Analisis Capaian

Kejadian kematian bayi sudah mencapai target yang telah ditetapkan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dimana realisasinya selalu dibawah target yang ditetapkan, dengan kematian bayi pada tahun 2019 yaitu 102 kasus (8,36/ 1000 KH) dari target <9/1000 Kelahiran Hidup, kematian bayi pada tahun 2020 yaitu 34 kasus (8,4/1000 KH dari target <8,8/1000 Kelahiran Hidup dan pada tahun 2021 jumlah kasus kematian bayi adalah 23 kasus (8,33/1000 KH dari target <10/1000 KH). Penyebab kematian bayi pada tahun 2021 adalah Covid-19 sebanyak 4 kasus, Pneumonia sebanyak 2 kasus, Diare sebanyak 1 kasus, Kelaianan Saluran Pencernaan 1 kasus dan kasus lain-lain sebanyak 15 kasus.

Upaya Rencana Tindak Lanjut untuk menurunkan Kematian Bayi dengan :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan sejak kelahiran sampai usia balita dengan memakai MTBS
- 2) Peningkatan sarana prasarana di tingkat pelayanan dasar dan rujukan
- 3) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan komplikasi pada bayi.
- 4) Perbaikan sistem rujukan baik di RS dalam wilayah maupun RS perbatasan.
- 5) Advokasi dan koordinasi lintas sector dan program dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita.

4. Angka Kematian Balita (AKBA)

Gambar 3.4.1

Gambaran Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Karanganyar tahun 2019 s/d 2021

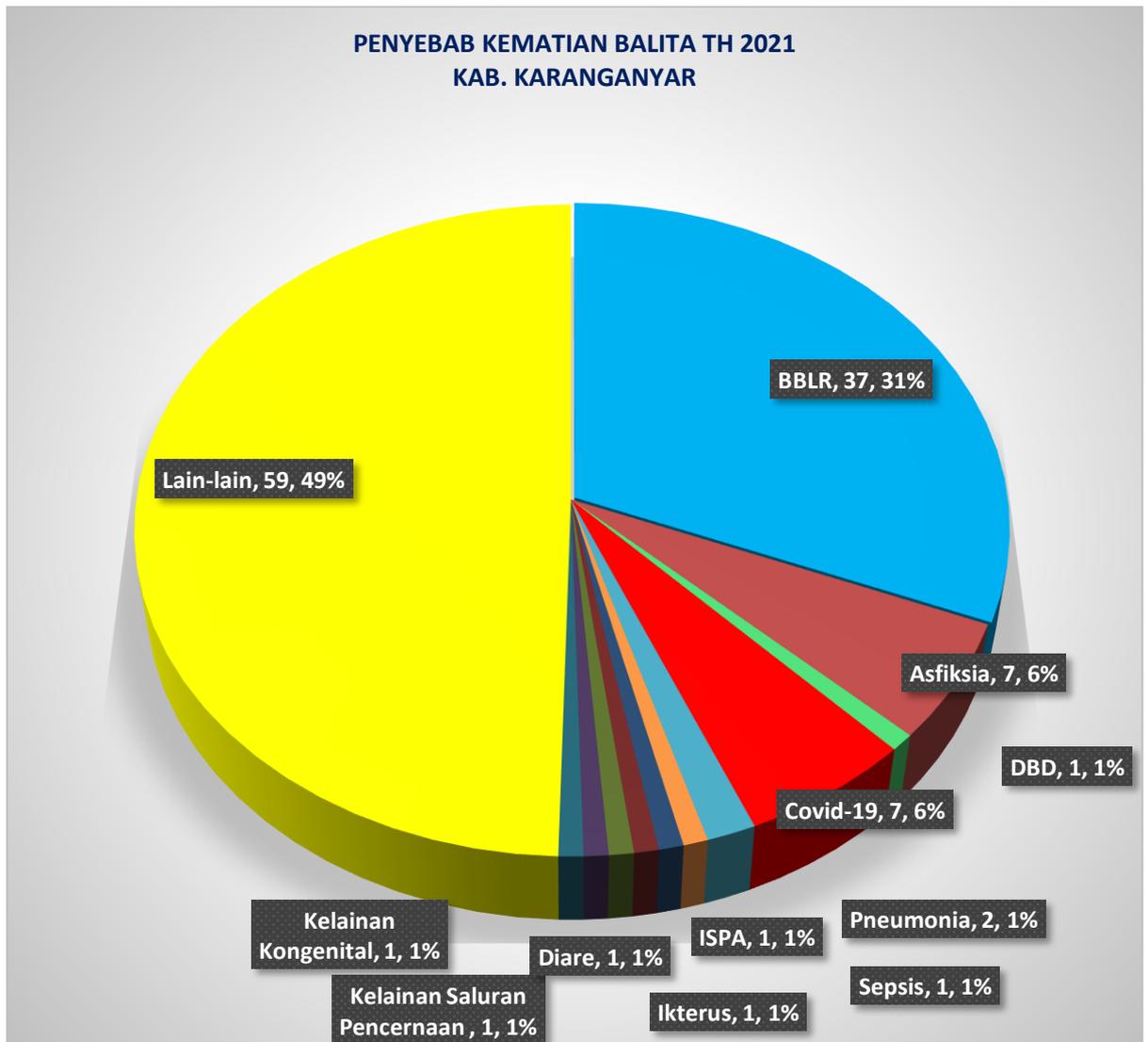


Dari grafik di atas dilihat bahwa angka kematian balita masih terjadi peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan di Kabupaten Karanganyar. Walaupun demikian

realisasi angka kematian balita masih dibawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat 117 kasus kematian Balita atau 2,50/1000 Populasi Balita. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 119 kasus kematian Balita atau 2,58/1000 Populasi balita.

Gambar 3.4.2

Gambaran Penyebab Kematian Balita TH 2021 di Kabupaten Karanganyar



Analisis Capaian

Kejadian angka kematian balita pada tahun 2020 2,50/ 1000 populasi balita dan 2,58/1000 populasi balita pada tahun 2021. Adapun penyebab kematian pada balita pada tahun 2021 terdiri dari BBLR (37 kasus), Covid-19 (7 kasus), Asfiksia (7 kasus), Pneumonia (2 kasus), Sepsis (1 kasus), Kelainan Kongenital (1 kasus), Ikterus (1 kasus), ISPA (1 kasus), Diare (1 kasus) dan Lain-lain sebanyak 59 kasus. Upaya Rencana Tindak Lanjut untuk menurunkan Kematian Balita dengan :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan sejak kelahiran sampai usia balita dengan memakai MTBS
- 2) Peningkatan sarana prasarana di tingkat pelayanan dasar dan rujukan
- 3) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan komplikasi pada balita dan pelayan SDIDTK
- 4) Perbaikan sistem rujukan baik di RS dalam wilayah maupun RS perbatasan.
- 5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam memberi pola asuh asih asuh pada balita yang berdampak pada kesehatan balita
- 6) Advokasi dan koordinasi dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita.

b) Sasaran Kedua : Meningkatkan tata kelola organisasi (Nilai SAKIP)

Nilai SAKIP dinas kesehatan pada tahun 2019 adalah 79,89, dimana nilai tersebut sudah melampaui dari target nilai SAKIP Dinas Kesehatan yaitu 71. Nilai SAKIP untuk Tahun 2020 adalah 80,14 dengan target SAKIP tahun 2020 adalah 73. Untuk nilai SAKIP tahun 2021 belum keluar karena belum dilaksanakan review oleh Inspektorat. Untuk tahun 2021 target Nilai SAKIP Dinas Kesehatan adalah 75.

B. REALISASI ANGGARAN

B.1. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Rincian program untuk membiayai Sasaran 1 dapat dilihat dari Tabel 3.5 di bawah.

Tabel 3.5

Program Kerja untuk Mencapai Sasaran I

No	PROGRAM	KEUANGAN			% Fisik
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	%	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	91.995.355.600	81.050.171.484	88,10	97
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.608.823.9000	3.365.983.500	93,27	100
3	Program Perbedayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	544.799.200	536.783.600	98,53	100
	JUMLAH	96.148.978.700	84.952.938.584	88,36	98

Dari anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp. 11.196.040.116,- . Dari jumlah tersebut, Rp. 2.226.759.000,- (19,89%) sebagai efisiensi anggaran, dan sisanya sebesar Rp. 8.969.281.116,- (80,11%) menjadi SILPA yang salah satunya merupakan anggaran Akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 904.342.059,- yang batal dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19 sehingga untuk pendanaan akreditasi tidak dicairkan.

Kebijakan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah penguatan sistem Monitoring dan Evaluasi yang terpadu yang diformulasikan dalam program GERDU-SERA (Gerakan Terpadu Sehatkan Rakyat). Gerdu Sera merupakan aplikasi terpadu yang berisi Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang dimulai dari tingkat desa, berjenjang melalui Puskesmas Sampai Dinas Kesehatan.

Aplikasi ini didukung pemberian sarana prasarana dari Pemerintah berupa 212 laptop yang dibagi kesemua bidan wilayah desa, yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dan dilanjutkan pada tahun 2020. Hasil yang diharapkan dari program tersebut adalah perbaikan UHH, AKI, AKB, AKB dan Prevalensi Gizi Buruk sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Implementasi dari program ini terurai dalam Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Dengan indikator kinerja adalah ASI eksklusif, balita mendapatkan Vit. A, tertanganinya balita gizi buruk, remaja putri mendapatkan tablet tambah darah dan pemeriksaan iodium pada anak SD kelas 4 atau 5, melalui kegiatan :

- a. System kewaspadaan pangan dan gizi dengan melaksanakan surveilens gizi masyarakat sehingga dapat mendeteksi kasus gizi kurang
- b. Pembinaan kader posyandu yang dilakukan dengan kegiatan peningkatan kapasitas kader dan pemberian jasa tenaga kader

- c. upaya perbaikan gizi masyarakat dengan gerakan pola makan gizi seimbang untuk Masyarakat serta pelaksanaan kelas Calon pengantin dengan tema 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) & pencegahan stunting
- d. penanganan balita gizi kurang yaitu dengan kunjungan kasus gizi buruk, pemberian PMT, monitoring dan pendampingan kasus, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan pemenuhan sarana untuk peningkatan mutu pelayanan.

7. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

8. Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan

10. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Dengan indikator kinerja yaitu terlaksananya pendampingan pasca akreditasi, workshop peningkatan kapasitas tata kelola manajemen mutu pelayanan kesehatan.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

a) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- 2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

b) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- 1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a) Advokasi, Pembedayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dngan Sub Kegiatan :

- 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- b) Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

B.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Dilaksanakan Dinas Kesehatan-Puskesmas dan RSUD

A. DINAS KESEHATAN

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Keu	%Fisik
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	335.192.800	326.927.200	97,53	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000	20.000.000	100	100
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	20.000.000	100	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.802.800	59.909.800	96,94	100
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	96.000.000	96	100
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	74.319.252.000	72.634.904.799	97,73	100

7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	250.000.000	245.463.000	98,18	100
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000	199.686.100	99,84	100
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	150.000.000	128.083.300	85,39	100
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	200.000.000	195.957.000	97,98	100
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	148.300.000	144.060.000	97,14	100
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	100	100
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.500.000	16.678.000	90,15	100
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.430.000	245.052.000	94,82	100
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	72.790.000	97,05	100
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	116.373.800	99.763.800	85,73	100
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	109.292.614	72,86	100
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				

	Daerah				
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	950.000.000	866.661.000	91,23	100
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.362.500	161.900.000	94,48	100
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.500.000	33.798.387	97,97	100
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	622.500.000	583.283.155	93,70	100
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000	99.794.005	47,52	70
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.998.000	129.653.900	99,74	100
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	120.041.200	92,34 3	100
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
IX	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
26	Pembangunan Puskesmas	11.155.627.000	8.928.868.000	80,04	100
27	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	0	0

28	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	97.000.000	96.8881.000	99,88	100
29	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.695.600.000	2.333.960.000	86,77	100
30	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.253.652.200	1.169.974.400	93,33	100
31	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	62.090.800	61.334.800	98,78	100
32	Pengadaan Obat, Vaksin	5.369.504.700	5.294.519.977	98,60	100
X	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	298.625.000	296.739.800	99,37	100
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.564.142.000	1.691.451.500	65,97	80
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.000.000	24.025.000	96,10	100
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	116.840.000	107.210.000	91,76	100
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.550.000	39.738.000	98,00	100
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	41.300.000	39.871.000	96,54	100
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	45.900.000	44.764.000	97,53	100
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	85.000.000	84.472.000	99,38	100
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.100.000	5.100.000	100	100
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	150.000.000	150.000.000	100	100

43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	77.312.000	75.361.700	97,48	100
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	51.495.000	41.207.500	80,02	100
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.240.327.000	1.097.771.700	88,51	100
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	294.796.000	283.669.000	96,23	100
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	48.543.000	97,09	100
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	368.605.000	332.762.575	90,28	100
49	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	277.270.000	271.336.000	97,86	100
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100.000.000	97.875.000	97,88	100
51	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	150.000.000	136.461.100	90,97	100
52	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	761.538.000	755.696.100	99,23	100
53	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.880.729.400	25.434.865.208	94,62	100
54	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15.400.000	12.069.000	78,37	100
55	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14.824.142.000	12.581.521.120	84,87	90
56	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.488.991.000	584.648.941	39,26	65
57	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	144.000.000	143.205.400	99,45	100

58	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	20.170.088.000	17.732.809.963	87,92	90
XI	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
59	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	292.311.500	283,587.000	97,02	100
XII	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
60	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	15.000.000	11.160.000	74,40	100
61	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	687.419.000	654.751.700	95,25	100
62	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100.000.000	96.960.000	96,96	100
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
XIII	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
63	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.781.620.000	2.605.430.000	93,67	100
64	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	447.893.000	396.317.800	88,48	100
XIV	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
65	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	379.310.900	364.235.700	96,03	100

	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
XV	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
66	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	42.203.000	38.880.600	92,13	100
67	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14.676.300	14.676.300	100	100
68	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	23.842.700	20.312.600		100
XVI	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
69	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	112.666.600	112.596.600	99,94	100

XVII	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
70	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	85.000.000	75.940.000	89,34	100
XVIII	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				
71	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	25.000.000	25.000.000	100	100
XIX	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				
72	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	87.165.000	77.145.000	88,50	100
73	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	73.788.800	65.149.500	88,29	100
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
XX	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor				

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
74	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	499.799.200	495.960.000	99,23	100
XXI	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
75	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	25.000.000	23.182.000	92,73	100
XXII	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
76	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.000.000	17.641.000	88,21	100

B. RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Keu	% Fisik
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	34.364.670.000	34.288.941.933	99,78	100
II	Peningkatan Pelayanan BLUD				
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD	181.890.647.000	143.149.835.249	78,70	100
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN				

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000	198.000.000	99,00	100
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	200.000.000	197.790.000	98,90	100
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.709.000.000	3.309.991.828	89,24	100
II	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	22.803.036.000	22.744.107.745	99,74	100

C. PUSKESMAS

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Keu	% Fisik
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
I	Peningkatan Pelayanan BLUD				
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jatipuro	1.892.000.000	1.525.775.652	80,64	100
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskemas Jatiyoso	2.426.769.000	1.579.520.103	65,09	100
3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	2.491.377.000	1.766.264.567	70,90	100

	Jumapolo					
4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jumantono	2.758.867.000	2.222.024.853	80,54	100	
5	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Matesih	2.255.000.000	2.200.468.333	97,58	100	
6	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tawangmangu	2.030.500.000	1.787.782.988	88,05	100	
7	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngargoyoso	2.043.749.000	1.752.517.367	85,75	100	
8	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangpandan	2.644.701.000	1.988.845.484	75,20	100	
9	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	2.710.450.000	2.376.917.055	87,69	100	
10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tasikmadu	2.139.290.000	1.732.617.196	80,99	100	
11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jaten I	1.759.800.000	1.366.923.611	77,67	100	
12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jaten II	1.275.160.000	988.399.887	77,51	100	
13	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Colomadu I	1.312.083.000	1.118.536.814	85,25	100	
14	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Colomadu II	1.171.566.000	1.207.015.607	103,03		
15	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gondangrejo	2.797.627.000	2.344.151.133	83,79	100	
16	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kebakkramat I	3.002.958.000	1.912.232.040	63,68	100	
17	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kebakkramat II	1.382.177.000	1.291.384.754	93,43	100	

18	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mojogedang I	2.733.503.000	1.914.328.844	70,03	100
19	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mojogedang II	1.563.437.000	1.372.001.482	87,76	100
20	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kerjo	3.053.490.000	2.036.835.319	66,71	100
21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jenawi	2.192.164.000	1.511.366.054	68,94	100
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
I	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	Operasional Pelayanan Puskesmas Jatipuro	681.121.000	349.914.950	51,37	100
2	Operasional Pelayanan Puskesmas Jatiyoso	692.287.000	434.744.000	62,80	100
3	Operasional Pelayanan Puskesmas Jumapolo	614.125.000	409.779.100	66,73	100
4	Operasional Pelayanan Puskesmas Jumantono	692.287.000	420.260.500	60,71	100
5	Operasional Pelayanan Puskesmas Matesih	636.457.000	312.717.700	49,13	100
6	Operasional Pelayanan Puskesmas Tawangmangu	781.614.000	494.529.000	63,27	100
7	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngargoyoso	736.951.000	467.673.000	63,46	100
8	Operasional Pelayanan Puskesmas Karangpandan	658.789.000	418.027.850	63,45	100
9	Operasional Pelayanan Puskesmas Karanganyar	669.955.000	470.514.000	70,23	100

10	Operasional Pelayanan Puskesmas Tasikmadu	602.960.000	362.770.500	60,16	100
11	Operasional Pelayanan Puskesmas Jaten I	614.125.000	443.580.000	72,23	100
12	Operasional Pelayanan Puskesmas Jaten II	614.131.000	453.778.000	73,89	100
13	Operasional Pelayanan Puskesmas Colomadu I	647.623.000	510.313.000	78,80	100
14	Operasional Pelayanan Puskesmas Colomadu II	636.463.000	496.731.000	78,05	100
15	Operasional Pelayanan Puskesmas Gondangrejo	725.785.000	539.807.000	74,38	100
16	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebakkramat I	602.960.000	356.877.000	59,19	100
17	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebakkramat II	602.960.000	397.834.000	65,98	100
18	Operasional Pelayanan Puskesmas Mojogedang I	625.291.000	467.048.000	74,69	100
19	Operasional Pelayanan Puskesmas Mojogedang II	602.960.000	373.310.000	61,91	100
20	Operasional Pelayanan Puskesmas Kerjo	647.623.000	400.324.000	61,81	100
21	Operasional Pelayanan Puskesmas Jenawi	658.789.000	261.706.000	39,73	100

Dari semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit hampir semua dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

Tabel 3.7
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN
(DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT, PUSKESMAS)
TAHUN 2021

NO	INSTANSI	ANGGARAN	REALISASI	% keu	% fisik
1	DinasKesehatan	175.334.533.000	162.042.338.444	92,42	98
2	RSUD	243.167.353.000	203.888.666.735	83,85	95
3	Puskesmas	59.381.929.000	44.838.148.243	75,51	94
	Total	477.883.815.000	410.769.153.422	85,96	96

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam realisasi anggaran adalah :

- a) Akreditasi Puskesmas dari dana DAK hanya terealisasi 39,23% dikarenakan dengan adanya pandemi covid19, untuk akreditasi pada tahun anggaran 2021 dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya setelah pandemi covid 19 dapat diatasi.
- b) Pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan hanya terealisasi 47,52% dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu perbaikan mobil ambulance puskesmas gondangrejo, dimana pagu perbaikan lebih kecil daripada biaya untuk perbaikan, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- c) Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin, untuk persalinan bagi ibu bersalin yang beresiko atau mengalami komplikasi dari keluarga tidak mampu yang memiliki JKN sudah tercover dengan JKN, sehingga tidak dapat dibiayai dengan dan JAMPERSAL sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal dan menjadi SILPA.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pencapaian indikator kinerja *sangat tinggi*, yaitu 96%.
2. Dalam pelaksanaan sasaran RENSTRA, kendala yang masih dihadapi Dinas Kesehatan antara lain :
 - a. Masih terjadinya Kematian Ibu, Bayi dan Balita. Dimana untuk tahun 2021 Angka Kematian Ibu melebihi dari target yang ditetapkan. Untuk Angka Kematian Bayi, Neonatus dan Balita telah memenuhi target yang ditetapkan. Kasus kematian ibu untuk tahun 2021 di dominasi karena covid-19. Indikator ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya dikarenakan AKI-AKN-AKB-AKBA dan Gizi buruk maupun stunting merupakan vital statistik yang dipengaruhi banyak faktor
 - b. Kualitas mutu pelayanan dalam pencapaian penurunan AKI-AKB-AKN-AKBA perlu di monitor dan dilakukan secara berkesinambungan
 - c. Kualitas tata kelola organisasi belum optimal.

B. SARAN

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, beberapa hal yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2021, antara lain :

1. Perlunya penguatan program dan kegiatan yang mendukung penurunan AKI-AKB-AKN-AKBA.
2. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi pada setiap jenjang administrasi.
3. Ditingkatkannya koordinasi antar program dalam perencanaan penganggaran.
4. Perlu dilakukan evaluasi program agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
5. Evaluasi terhadap kegiatan, agar selaras dan relevan dengan program yang ada, sehingga capaian kegiatan akan menunjang capaian kinerja organisasi.